

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Meninjau Peraturan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan Malaysia

Penulis :

Esti Kanti Pertiwi, S.H., M.H

M. Endriyo Susila, S.H., MCL., Ph.D



CV. STRATA PERSADA ACADEMIA

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Meninjau Peraturan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan Malaysia

Penulis:

Esti Kanti Pertiwi, S.H., M.H

M. Endriyo Susila, S.H., MCL., Ph.D

Desain Cover:

Tim Creative

Tata Letak:

Azmi Asyfia

Ukuran:

i - iii, 1- 108, uk: 15.5x23 cm

ISBN:

978-623-09-5011-7

Cetakan Pertama:

Agustus 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by CV. Strata Persada Academia

All Right Reserved

DILARANG KERAS MENERJEMAHKAN, MEMFOTOKOPI, ATAU MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT.

PENERBIT:

CV. Strata Persada Academia

Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45183

Website: www.stratapersada.com

Instagram: @stratapersada

Email: admin@stratapersada.com

KATA PENGANTAR PENULIS

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga kami haturkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, yang telah memberikan inspirasi dan tuntunan dalam upaya memahami serta mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh umat manusia.

Buku ini, berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Meninjau Peraturan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan Malaysia," adalah suatu karya yang dihasilkan dari upaya mendalam dalam menggali dan menganalisis fenomena tragis yang merenggut hak asasi manusia, yaitu perdagangan orang. Fenomena ini, sebagai bentuk kejahatan lintas batas yang mengabaikan martabat manusia, telah menghancurkan banyak nyawa dan menghancurkan masa depan yang seharusnya cerah.

Buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Dalam era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam menangani perdagangan orang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta kolaboratif.

Penulis merasa penting untuk memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses penulisan buku ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral serta inspirasi dalam perjalanan penulisan.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami permasalahan perdagangan orang serta upaya-upaya hukum yang dilakukan

oleh Indonesia dan Malaysia dalam memerangi kejahatan tersebut. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan mendorong perubahan positif dalam peraturan serta penegakan hukum di bidang ini. Dengan semangat optimisme, mari bersama-sama kita berjuang untuk mengakhiri perdagangan orang dan menjaga kehormatan serta martabat setiap individu.

Yogyakarta, 13 Agustus 2023

Esti Kanti Pertiwi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB 2.....	11
TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	11
A. Tinjauan Penegakan Hukum	11
B. Tinjauan Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan Perdagangan Orang	21
BAB 3.....	29
PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA 29	
BAB 4.....	43
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA 43	
BAB 5.....	98
KONSEP KE DEPAN TERKAIT PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA BERDASARKAN KAJIAN PERBANDINGAN DENGAN MALAYSIA	98
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bayu Aji Pramono dan Mahrus Ali, 2011, "Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia", Bandung, PT.Citra AB.
- Bergas Prana Jaya, 2020, "Pengantar Ilmu Hukum", Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia.
- Boy Nurdin, 2012, "Kedudukan dan Fungsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", Bandung, PT. Alumni.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, "Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Refika Editama.
- Djoni Sumardi Gozali, 2020, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum", Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 10.
- Farhana, 2010, "Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika.
- Frans Maramis, 2016, "Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia", Depok, PT. RajaGrafindo Persada.
- Henny Nuraeny, 2011, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahan)", Jakarta, Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny, 2016, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jakarta, RajaGrafindo.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, "Hukum Pidana", Malang, Setara Press.
- H.Salim HS dan Rodliyah, 2017, "Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)", Jakarta, PT. RajaGrafindo.
- I Wayan Parthiana, 2015, " Hukum Pidana Internasional", Bandung, CV.Yrama Widya.

- Ishaq, 2017, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", Bandung, Alfabeta
- Laurensius Arliman S, 2015, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat", Yogyakarta, Deepublish.
- M. Agus Santoso, 2014, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Jakarta, Kencana.
- Muhammad Kamal, 2019, "Human Trafficking (Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia)", Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nashriana, 2011, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia", Jakarta, Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, Kencana Prenada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Prenada.
- Sarjono Soekanto, 2004, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada.
- Siti Merida Hutagalung, 2011, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?", Edisi Khusus.
- Uswatun Hasanah dan Eny Suatuti, 2019, "Buku Ajar Teori Hukum", Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Wiyono, 2016, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Aditya Rizky Dwirivanda, 2020, "Kebijakan Indonesia Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Malaysia (2012-2017)", Vol. 6 No. 3.
- Aidul AF, 2012, " Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", Vol. 19 No. 4.

- Amrunsyah, 2017, "Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak", Vol. 4 No.1.
- Amrunsyah, 2019, " Impian Yang Terabaikan (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)", Vol. 4 No. 01.
- Ana Suheri, 2018, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Nasional", Vol. 4 No. 1,
- Andini Indriawati, Subekti, 2020, "Analisis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 890/PID.SUS/2018/PN BTM), Vol. 9 No. 3.
- Basar Dikuraisyin, 2017, "Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia", Vol. 1 No. 3.
- Bastianto Nugroho, M. Roesli, 2017, "Analisa Hukum Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)" Vol. 2 No. 1.
- Bilher Hutahaean, 2013, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", Vol. 6 No.1.
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, 2019, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", Vol. 1 No.3.
- Chazizah Gusnita, 2016, "Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional KhususnyaPerdagangan Manusia", Vol. 11 No.1.
- Dheny wahyudhi, 2015, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", Jurnal Ilmu Hukum.
- Edi Rosadi, 2016, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan", Vol. 1 No. 1.
- Evi Masrifatin Silvia, 2020, "Upaya Penganggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir", Vol 1 No. 1.
- Hajah Makiah Tussaripah binti Jamil, 2021, "Upaya Mengantisipasi Perdagangan Manusia Ditinjau Menurut Anti-Trafficking In Persons Act, 2007 dan Hukum Islam", Vol. 18 No.1.

- Imam Sukadi, 2011, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia", Vol. 7 No.1.
- Indah Sari, 2019, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan", Vol. 10 No.1.
- Irawan Safaruddin Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kerjahatan seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", Vol.23 No.1.
- Jacob Hattu, 2020, "Pertanggung Jawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus", Vol. 6 No. 1.
- Kurniawan Hendratno dan Umar Ma'ruf, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah", Vol. 12 No. 2.
- Made Sidia Wedasmara, 2018, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)", Vol. 12 No. 1, hlm. 3.
- Maslihati Nur Hidayati, 2012, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", Vol. 1, No. 3.
- Miswanto, Desmayeti Arfa, 2016, "Perdagangan dan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia", Vol. 18 No.1.
- M. Makhfudz, "Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia", Vol. 4 No. 1.
- Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekan Baru", Vol. 4 No. 1.
- M. Husein Maruapey, 2017, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" Vol. 7 No. 1.
- Nasaruddin Umar, 2013, " Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia", Vol. 9 No. 2.
- Nelsa Fadilla, 2016, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Vol. 5 No.2.

- Novianti, 2014, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara", Jurnal Ilmu Hukum.
- Okky Cahyo Nugroho, 2018, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)", Vol. 18 N0.4.
- Septa Candra, 2013, "Perumusan ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Vol. 3 No. 3.
- Shidqi Noer Salsa, 2020, "Mutual Legal Assistance Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional", Call For Paper.
- Sigit Somadiyono, 2020, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia", Vol. 4 No. 2.
- Siti Nurhayati, 2015, "Aspek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Anak (Human Trafficking)", Vol. 6 No. 1.
- Sri Endah Wahyuningsi, Rismanto, 2015, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", Vol. 11 No.1.
- Suzanalisa, 2014, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur", Vol.14 No.3.
- Tri Wahyudi, Susilo Handoyo, Rosdiana, 2019, "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan", Vol. 1 No. 2.
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum.
- Yenny Chandrawaty, 2020, "Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human

- Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia”, Vol. 17 No. 4.
- Yori Elfitriani, Tri Legionosuko, Surryanto Djoko Waluyo, 2018, “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia Di Perbatasan Indonesia dan Malaysia”, Vol. 4 No. 3.
- Zia Zakiri dan Mahfud, 2017, “Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Vol. 1 No. 1.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Negara Malaysia Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Permedagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

A. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

B. Internet

BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2018. Pusat Perlindungan, Pengembangan, dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI, 2019).

Lain-Lain

<https://www.liputan6.com/health/read/3423825/magang-palsu-di-luar-negeri-modus-baru-eksploitasi-anak> diakses Selasa tanggal 4 Februari 2020.

<https://www.voaindonesia.com/a/kpai-magang-ke-luar-negeri-modus-baru-perdagangan-anak-/4331568.html> diakses Selasa tanggal 4 Februari 2020.

IOM Indonesia, Basis Data Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia, 2018).

IOM Indonesia, 2009, "Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan TPPO", Jakarta, IOM Indonesia.

Jurnal Hukum, <https://www.jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/>, Diakses pada Tanggal 1 juni 2021.

Billy Aditya, <https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli-beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-klm.html?page=1>, diakses pada tanggal 1 juni 2021.

Sudut Hukum, <https://suduthukum.com/2017/11/definisi-perbandingan-hukum.html>, Diakses pada tanggal 12 februari 2022.

Unair News, <http://news.unair.ac.id/2020/07/14/peran-asean-mengatasi-perdagangan-perempuan-dan-anak/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

Zaki Amrullah, <https://www.dw.com/id/malaysia-indonesia-sepakati-kerjasama-keamanan-lintas-batas/a-2956679>, diakses pada 16 Januari 2021.